



DINAMIKA PENGANGGURAN TERDIDIK: TANTANGAN MENUJU BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA

Oleh

Sri Maryati

Mahasiswa Prog S3 Ilmu Ekonomi FE Universitas Andalas/
Staf Pengajar Jurusan IE-FE Universitas Andalas
Kampus Unand Limau Manis Padang
email: srie_jayamahe@yahoo.co.id

Abstract

According to the United Nations demographic transition that occurred in recent decades in Indonesia would be an opportunity for Indonesia to reach a demographic dividend in the period 2020-2030 . By the time the productive age population amounted to twice that of the non - productive population . These opportunities should be best utilized as it will only happen once and it can happen if the population of working age have a job and sufficient income . thus this demographic bonus can actually stimulate the economy of Indonesia in the future . But on the other hand, Indonesia is currently facing serious problems of labor that is still large numbers of educated unemployment . The number of unemployed educated annually feared will continue to grow as the number of college graduates also continue to grow , but not all college graduates can be accommodated in the workplace , consequently leads to an increase in the number of educated unemployed . The main purpose of this study is to analyze the dynamics of educated unemployment in Indonesia and the steps that need to be done by the government and people of Indonesia in order to face the era of demographic bonus, so it does not become a wave of mass unemployment, particularly educated unemployment in Indonesia.

Abstrak

Menurut United Nations transisi demografi yang terjadi pada beberapa dekade terakhir di Indonesia akan membuka peluang bagi Indonesia untuk menikmati bonus demografi pada periode tahun 2020-2030. Pada saat tersebut penduduk usia produktif berjumlah dua kali lipat dari penduduk non-produktif. Peluang ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya karena hanya akan terjadi satu kali dan itu dapat terjadi apabila penduduk usia produktif benar-benar bisa berkarya dan berkiprah secara produktif. Sehingga diharapkan bonus demografi ini benar-benar dapat mendorong perekonomian Indonesia dimasa mendatang. Namun di sisi lain Indonesia saat ini menghadapi permasalahan serius ketenagakerjaan yakni masih besarnya angka pengangguran terdidik. Jumlah pengangguran terdidik setiap tahunnya dikhawatirkan akan terus bertambah karena jumlah lulusan perguruan tinggi juga terus bertambah, akan tetapi tidak semua lulusan perguruan tinggi dapat tertampung di dunia kerja, akibatnya akan mendorong terjadinya peningkatan jumlah pengangguran terdidik. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengangguran terdidik di Indonesia dan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam rangka menghadapi era bonus demografi agar era ini tidak menjadi gelombang pengangguran massal, khususnya pengangguran terdidik di Indonesia.
Keywords: demographic bonus, educated unemployment, the economy of Indonesia

PENDAHULUAN

Selama kurun waktu satu dekade terakhir ini, Indonesia tengah mengalami fenomena transisi demografi. Kondisi ini terindikasi dari hasil sensus penduduk pada tahun 2000 yang memberikan fakta signifikan bahwa program KB (Keluarga Berencana) yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia pada waktu yang lalu memberi dampak yang sangat positif. Fakta yang diperlihatkan oleh Sensus Penduduk 2010 memperlihatkan bahwa penduduk berusia dibawah 15 tahun hampir tidak bertambah; dimana pada periode tahun 1970-1980an jumlahnya sekitar 60 juta dan hingga akhir tahun 2000 penduduk dalam kelompok usia ini hanya meningkat menjadi 63-65 juta jiwa. Sebaliknya, penduduk usia 15 – 64 tahun pada tahun 1970 jumlahnya mencapai 63-65 juta dan telah berkembang menjadi lebih dari 133 – 135 juta, atau mengalami kenaikan dua kali lipat selama 30 tahun.

Selanjutnya jika dilihat beban ketergantungan penduduk yang diukur dari ratio penduduk usia anak-anak dan tua per penduduk usia kerja, maka tampak bahwa tingkat ketergantungan penduduk Indonesia menunjukkan trend yang menurun cukup tajam, dimana pada tahun 1970an nilainya sekitar 85-90 per 100 dan pada tahun 2000 menurun hingga ke level sekitar 54-55 per 100 di tahun 2000. Hasil sensus penduduk tahun 2010 juga menunjukkan trend positif pada penduduk usia produktif (15-64 tahun), dimana pada tahun 2010 persinya mencapai 66 persen dari total penduduk yang jumlahnya mencapai 157 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk usia muda (15-24 tahun) mencapai 26,8 persen atau 64 juta jiwa. Kenaikan angka usia produktif kerja tersebut menyebabkan semakin kecilnya nilai angka ketergantungan menjadi 51. Hal ini berarti 100 penduduk usia produktif menanggung 51 orang penduduk tak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas

64 tahun). Menurut *United Nations* transisi demografi yang terjadi pada beberapa dekade terakhir di Indonesia akan membuka peluang bagi Indonesia untuk menikmati bonus demografi (*demographic dividend*) pada periode tahun 2020-2030.

Dalam konsep ekonomi kependudukan, bonus demografi juga dimaknai sebagai keuntungan ekonomis karena dengan semakin besarnya jumlah penduduk usia produktif maka akan semakin besar pula jumlah tabungan dari penduduk produktif sehingga dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kondisi tersebut juga dikenal sebagai jendela kesempatan (*windows of opportunity*) bagi suatu negara untuk melakukan akselerasi ekonomi dengan menggenjot industri manufaktur, infrastruktur, maupun UKM karena berlimpahnya angkatan kerja tersebut. Banyak Negara menjadi kaya karena berhasil memanfaatkan jendela peluang bonus demografinya untuk memacu pendapatan perkapita sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai; seperti yang terjadi di Cina, yang pertumbuhan ekonominya sebelum bonus demografi berkisar pada angka 6% meningkat menjadi 9,2 persen, Korea Selatan dari 7,3 persen menjadi 13,2 persen, Singapura dari 8,2 persen meningkat menjadi 13,6 persen dan Thailand dari 6,6 persen meningkat tajam menjadi 15,5 persen

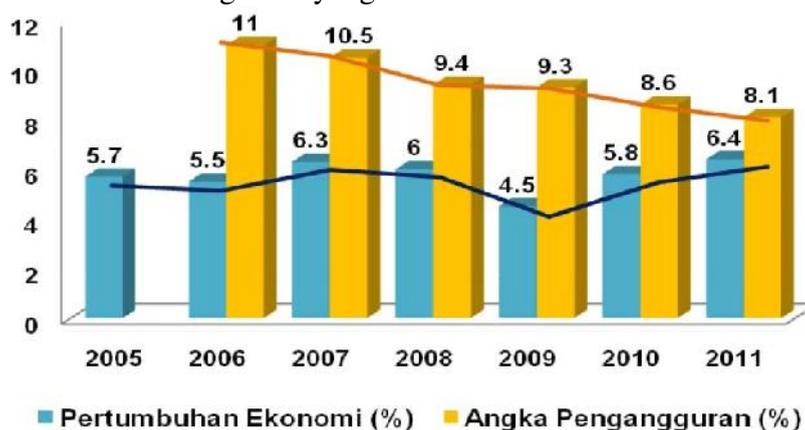
Namun akan ada dampak efek negatif berikutnya paska bonus demografi yang harus diperhatikan yaitu terjadinya peningkatan penduduk usia tua sementara transisi usia muda menjadi usia produktif belum sempurna (Adioetomo, 2005 : dalam Jati; 2013)). Hal itulah yang kemudian menyebabkan pembengkakan jaminan sosial dan pensiunan sehingga akan mendorong terjadinya stagnasi dalam perekonomian nasional karena tabungan dari usia produktif dialihkan sebagai dana talangan kedua hal tersebut.

Jika diperhatikan lebih seksama, bonus demografi akan menjadi pilar peningkatan produktifitas suatu Negara dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan SDM yang produktif dalam arti bahwa penduduk usia produktif tersebut benar-benar mampu menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka dan memiliki tabungan yang dapat dimobilisasi menjadi investasi. Akan tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana penduduk usia produktif yang jumlah besar tidak terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia dalam sebuah perekonomian, maka akan menjadi beban ekonomi karena penduduk usia produktif yang tidak memiliki pendapatan akan tetap menjadi beban bagi penduduk yang bekerja dan akan memicu terjadinya angka pengangguran yang tinggi.

Indonesia dalam tujuh tahun terakhir (2005-2011) memiliki pertumbuhan ekonomi sekitar 4,5-6,4 persen, diharapkan akan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi di era bonus demografi. Hal ini akan mampu dicapai apabila pemerintah bersama masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi yang

diperkirakan akan dimulai pada tahun 2020. Tentu saja, ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk bisa memanfaatkan bonus demografi tersebut antara lain kualitas SDM Indonesia harus sudah memadai dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, dan bukan menjadi pengangguran yang membebani perekonomian nasional.

Jika diperhatikan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Indonesia selama periode tahun 2005-2011 tampak bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan mulai tahun 2010 setelah mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2009 sebagai akibat dari krisis ekonomi global di saat itu. Di sisi lain, angka pengangguran dapat ditekan dari waktu ke waktu, namun masih selalu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi yang mampu dicapai oleh perekonomian nasional. Hal inilah yang perlu diwaspadai untuk masa yang akan datang, agar Bonus demografi dapat dimanfaatkan menjadi momen bagi kebangkitan ekonomi nasional dan bukannya menjadi beban perekonomian nasional di masa depan.



Indikator	Realisasi					APBN-P	APBN
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah Penduduk (juta orang)	220.93	224.23	227.58	230.98	234.43	237.64	241.03
Angkatan Kerja (juta orang)	94.95	106.28	108.13	111.48	113.74	116	119.4

Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Pengangguran di Indonesia (%)

Sumber: Kompas, 2011 dalam Fikri; 2014

Jika dibandingkan dengan Negara lain di kawasan Asia, maka tingkat pengangguran di Indonesia termasuk yang tinggi, dengan tingkat rata-rata selama periode tahun 2008-2012 sebesar 7,2 persen, nilai yang sama juga dimiliki oleh Negara Filipina, sedangkan Thailand memiliki tingkat pengangguran yang terendah yakni 0,8 persen. Korea Selatan, dan Malaysia memiliki tingkat pengangguran pada kisaran 3%, Jepang dan China di kisaran 4 perse. Untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dimasa mendatang, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah menekan angka pengangguran di Indonesia, dengan upaya ini maka bonus demografi menjadi peluang bagi perekonomian nasional untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Dalam hal pengangguran, Indonesia hingga tahun 2013 masih

menghadapi permasalahan serius dalam hal ketenagakerjaan yakni masih besarnya angka pengangguran terdidik dimana jumlah pengangguran terdidik setiap tahunnya dikhawatirkan akan terus bertambah karena jumlah lulusan perguruan tinggi juga terus bertambah, akan tetapi tidak semua lulusan perguruan tinggi dapat tertampung di dunia kerja, akibatnya akan mendorong terjadinya peningkatan jumlah pengangguran terdidik di Indonesia. Untuk itu, diperlukan suatu upaya agar SDM yang telah memiliki pendidikan memadai juga memiliki keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan oleh dinamika dunia kerja, sehingga kekhawatiran akan peningkatan jumlah pengangguran terdidik ini dapat diatasi.

Tabel 1. Tingkat Pengangguran di Beberapa Negara di Asia (%)

Negara	Umur Pekerja (Tahun)	Tahun					Rata- rata
		2008	2009	2010	2011	2012	
Cina	15+	4.2	4.3	4.1	4.1	4.1	4.2
Filipina	15+	7.4	7.5	7.3	7.0	7.0	7.2
Hongkong	15+	3.5	5.2	4.3	3.4	3.3	3.9
Indonesia	15+	8.4	7.9	7.1	6.6	6.2	7.2
Jepang	15+	4.0	5.1	5.1	4.6	4.4	4.6
Korea Selatan	15+	3.2	3.7	3.7	3.4	3.3	3.5
Malaysia	15+	3.3	3.7	3.3	3.1	3.0	3.3
Pakistan	10+	5.2	5.5	5.6	6.0	7.7	6.0
Singapura	15+	2.2	3.0	2.2	2.0	2.0	2.3
Sri Lanka	10+	6.0	5.9	4.9	4.9	4.9	5.3
Thailand	15+	1.4	0.9	0.7	0.4	0.5	0.8

Sumber: IMF dalam BPS Indonesia, 2014.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengangguran terdidik di Indonesia dan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam rangka menghadapi era bonus demografi agar era ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan

perekonomian nasional dan tidak menjadi gelombang pengangguran massal, khususnya pengangguran terdidik di Indonesia .

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan studi literature yang menggunakan metode analisa deskriptif-

kualitatif berbasis kajian kepustakaan (*library research*). Analisa deskriptif kualitatif merupakan analisis yang didasarkan pada pemetaan permasalahan yang terdapat dalam variable atau kasus yang sedang dikaji dan kemudian dicari titik korelasinya. Korelasi tersebut bisa menjadi mengkonfirmasi, menolak, dan seimbang berdasarkan pada data dan informasi yang berhasil dilakukan oleh peneliti. Sedangkan studi kepustakaan merupakan instrument penelitian dengan mengumpulkan berbagai macam literatur baik dalam bentuk jurnal, buku, prosiding, working paper, maupun sumber data lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam kajian ini.

Adapun tahapan kegiatan dalam menganalisis data dan dokumen dalam kajian ini adalah:

- 1) Melakukan studi pendahuluan dengan meneliti kajian-kajian penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengangguran dan bonus demografi di Indonesia
- 2) Mengumpulkan literatur relevan sesuai dengan fokus permasalahan yang diangkat sebagai tema utama dalam kajian ini.

- 3) Menganalisis secara kritis berbagai sumber literatur tersebut untuk mendapatkan pemahaman mendasar mengenai korelasi antar studi dan variable yang diteliti
- 4) Menulis hasil kajian berdasarkan argumentasi analisis dari berbagai data dan kajian literatur.
- 5) Merumuskan rekomendasi berdasarkan argumentasi analisis dari berbagai data dan kajian literature.

PEMBAHASAN

1. DINAMIKA PENGANGGURAN TERDIDIK DI INDONESIA

Secara umum, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia menunjukkan penurunan selama lima tahun terakhir (2008-2013), akan tetapi jika dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ternyata penurunan pada tahun 2011-2013 (Tabel 2). Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan kesempatan kerja (Gambar 2). Kondisi seperti ini tentunya akan menjadi masalah jika tidak segera diantisipasi dengan baik karena akan memicu terjadinya peningkatan pengangguran.



Gambar 2. Kesempatan Kerja Menurut Pendidikan di Indonesia Tahun

Sumber: Sistem Informasi Kesra Nasional, 2014

Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa pertumbuhan angkatan kerja secara umum lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kesempatan kerja, bahkan untuk tingkat

pendidikan tinggi (diploma dan universitas) gap antara kesempatan kerja dan peningkatan angkatan kerja cukup besar.

Tabel 2. Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pengangguran, TPAK dan TPT Tahun 2008–2013

Tahun	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	(Juta Orang)	(Juta Orang)	(Juta Orang)	(%)	(%)
2008	111.95	102.55	9.39	67.18	8.39
2009	113.83	104.87	8.96	67.23	7.87
2010	116.53	108.21	8.32	67.72	7.14
2011	117.37	109.67	7.70	68.34	6.56
2012	118.05	110.81	7.24	67.88	6.14
2013	118.19	110.80	7.39	66.90	6.25

Sumber : BPS Indonesia, 2014

Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, maka tampak bahwa 54,32 persen pengangguran di Indonesia berpendidikan SLTA ke atas. (Tabel 3).

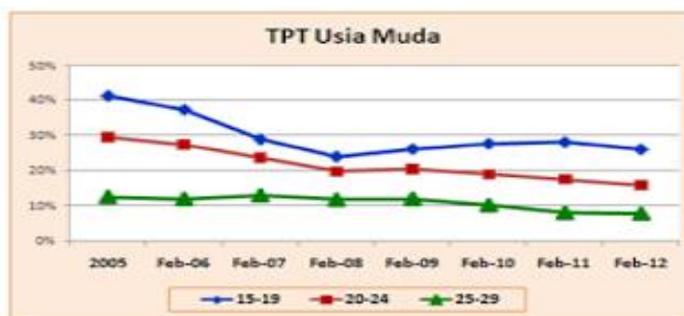
Hal ini mengindikasikan bahwa masalah pengangguran terdidik harus sudah menjadi focus perhatian dalam kebijakan ketanagakerjaan di Indonesia.

Tabel 3. Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Indonesia Tahun 2008-2013

No.	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2008		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak/belum pernah sekolah	103 296	1.13	81 432	1.10
2	Belum/tidak tamat SD	437 114	4.77	489 152	6.60
3	SD	2 032 025	22.20	1 347 555	18.18
4	SLTP	1 901 020	20.77	1 689 643	22.80
5	SLTA Umum	2 363 012	25.81	1 925 660	25.98
6	SLTA Kejuruan	1 382 199	15.10	1 258 201	16.98
7	Diploma I,II,III/Akademi	368 373	4.02	185 103	2.50
8	Universitas	567 287	6.20	434 185	5.86
Total		9 154 326	100.00	7 410 931	100.00

Sumber: SAKERNAS, BPS

Catatan: Data bulan Agustus

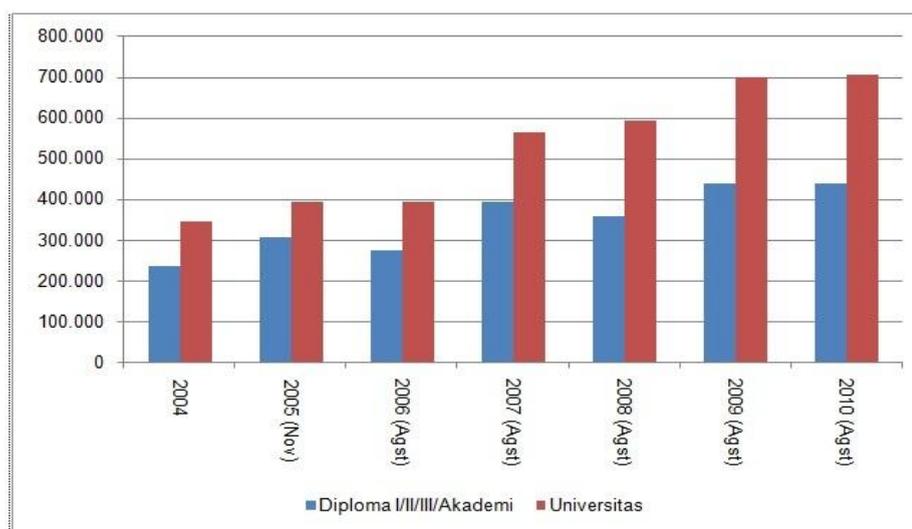


Gambar 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Usia Muda di Indonesia Tahun 2005-2012

Jika dilihat pada kelompok umur usia muda, maka tampak pengangguran berusia 15-19 tahun menduduki tempat tertinggi, diikuti oleh penduduk usia 20-24 tahun, serta penduduk usia 25-29 dimana penduduk dengan pendidikan perguruan tinggi berada pada kelompok ini, informasi lengkap dapat dilihat pada gambar 3.

universitas cenderung meningkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan lulusan diploma, hal ini mengindikasikan bahwa lapangan kerja untuk lulusan sarjana dan diploma masih sangat dibutuhkan dimasa mendatang untuk menekan laju pertumbuhan pengangguran terdidik di Indonesia.

Dilihat dari jumlah pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi selama periode tahun 2004-2010 tampak bahwa lulusan



Gambar 1. Jumlah Pengangguran Terbuka Lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia Periode 2004-2010 (SAKERNAS, dalam Badan Pusat Statistik, 2012).

Gambar 4. Jumlah Pengangguran Terbuka Lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia Tahun 2004-2010

2. FENOMENA BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA

Bonus demografi merupakan kondisi demografi dimana jumlah penduduk produktif melebihi jumlah penduduk yang tidak dalam usia produktif. Kondisi seperti ini tidak mudah terjadi atau bahkan bisa dikatakan kesempatannya hanya sekali saja. Di Indonesia, kondisi ini merupakan wujud dari keberhasilan program kontrol kelahiran bayi yang dicanangkan secara intensif pada tahun 1960-1970 an yaitu Program Keluarga Berencana oleh Pemerintah Orde Baru, karena moment kemunculannya yang sangat langka, maka bonus demografi harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan nasional melalui investasi sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kualitasnya.

Ledakan penduduk usia kerja ini akan memberikan keuntungan ekonomi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut (Jati, 2013):

- 1) Penawaran tenaga kerja (labor supply) yang besar dengan kualitas yang memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja
- 2) Meningkatkan pendapatan per kapita karena mendapat kesempatan kerja yang produktif;
- 3) Peningkatan peranan kaum perempuan di pasar tenaga kerja karena jumlah anak yang semakin sedikit memungkinkan perempuan memasuki pasar kerja dan membantu peningkatan pendapatan keluarga
- 4) Terjadi peningkatan tabungan (savings) masyarakat yang diinvestasikan secara produktif;

- 5) Adanya peningkatan investasi sumberdaya modal manusia (*human capital*)

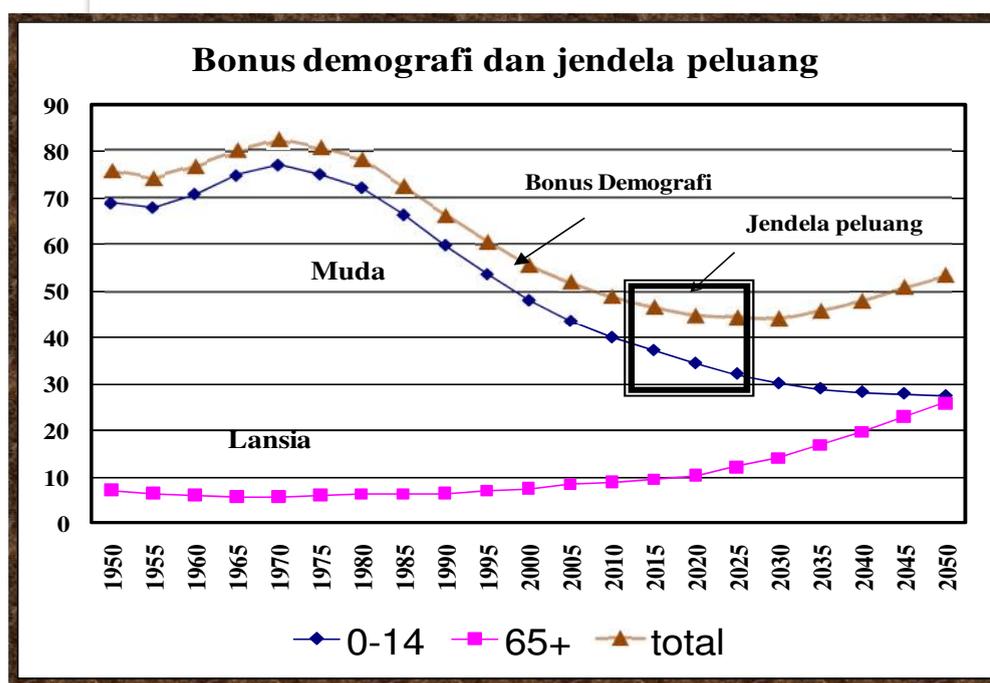
Jika dilihat dari gambar 5, maka tampak bahwa indikasi munculnya bonus demografi di Indonesia sudah mulai tampak sejak akhir tahun 2000 berdasarkan hasil Sensus Penduduk pada tahun tersebut. Hasil sensus itu memberikan gambaran resmi bahwa program KB memberi dampak yang sangat positif terhadap terjadinya transisi demografi yang mendorong munculnya bonus demografi. Kondisi ini menyebabkan penduduk dibawah usia 15 hampir tidak bertambah sebaliknya, penduduk usia 15 – 64 tahun berkembang dengan jumlah yang jauh lebih besar, dimana pertambahannya lebih dari duakali lipat, atau lebih 100 persen, selama

Periode waktu 30 tahun (1970-2000). Akibat dari kondisi ini adalah beban ketergantungan penduduk yang diukur dari ratio penduduk usia anak-anak dan tua per penduduk usia kerja menurun tajam, dari sekitar 85-90 per 100 di tahun 1970 menjadi sekitar 54-55 per 100 di tahun 2000.

Menurut data BPS Indonesia, pada tahun 2012 struktur penduduk Indonesia didominasi penduduk dewasa dan produktif dari segmen umur 25-64 tahun, dengan porsi mencapai 52,63 persen, usia anak sekolah dari segmen 10-24 tahun sebesar 29,39 persen, balita umur 0-5 tahun berada pada porsi 10,09 persen, dan penduduk usia lanjut berusia 65-75 ke atas mencapai porsi 7,16 persen. Berdasarkan kondisi ini, bonus demografi pada gelombang pertama akan dapat dimanfaatkan oleh penduduk dan masyarakat Indonesia pada tahun 2010 hingga 2020.

Trend positif tentang kedatangan bonus demografi masih akan berlanjut pada tahun 2020-2030. Pada rentang waktu ini, beban ketergantungan penduduk usia anak-anak dan beban ketergantungan penduduk usia tua berada pada posisi paling optimal. Setelah tahun 2030 beban ketergantungan penduduk usia tua akan meningkat sehingga beban ketergantungan total akan naik kembali. Diperkirakan

bonus yang dapat disumbangkan oleh penduduk usia kerja akan menjadi makin kecil karena harus menanggung beban ketergantungan penduduk usia tua yang jumlahnya akan semakin bertambah. Oleh sebab itu, bonus demografi tahap kedua ini perlu diwaspadai dan dipersiapkan dengan baik agar bonus demografi ini dapat memberikan bonus ekonomi dan bukan beban ekonomi.



Sumber: Baank Dunia 2009, dalam Jati 2013

Gambar 5. Tahap Kemunculan Bonus Demografi dan Jendela Peluang Bonus Demografi di Indonesia

Selanjutnya, jika dilihat gambaran makro pembangunan Indonesia yang masih memperlihatkan adanya ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia (KABARIN) dan Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN). Hal ini dapat dilihat dari nilai Indek Gini, yang merupakan indikator untuk mengukur ketimpangan dalam pembangunan dan pendapatan. Pada periode tahun 2011-2012 nilai indek ini telah menembus rekor tertinggi, yakni mencapai 0,41. Angka ini

menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan telah memasuki skala medium dan memberikan indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi pada dua tahun tersebut belum berkualitas.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas sehingga kurang peduli terhadap bonus demografi diantaranya dapat dilihat dari:

- 1) Masih terjadinya ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar

- provinsi, dimana IPM yang tinggi masih didominasi oleh bagian Barat dan Tengah seperti DKI Jakarta, DIY, Riau, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Sedangkan IPM rendah dimiliki oleh Papua, Maluku, Maluku Utara, NTB, dan NTT.
- 2) Masih terjadinya ketimpangan indeks angka melek huruf, dimana Penduduk kota Jakarta Timur mempunyai melek huruf 99 persen dengan rata-rata lama sekolah 10,9 tahun dan merupakan kota dengan nilai IPM tertinggi di Indonesia. Tetapi Mataram memiliki nilai melek huruf 95 persen dan rata-rata lama sekolah 7,4 tahun berada pada urutan IPM nomor 198 dan penduduk Jayawijaya hanya mempunyai melek huruf 32 persen dan rata-rata pendidikan 2,2 tahun berada jauh pada urutan IPM ke 341 dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Indonesia.
 - 3) Angka ketercukupan gizi; kawasan Indonesia Timur masih mendominasi angka gizi buruk pada penduduknya, angka gizi buruk yang tertinggi justru terjadi di wilayah dengan kekayaan sumber alam melimpah, seperti Papua dan Papua Barat. Prosentase angka gizi buruknya mencapai 34-36 persen, jauh lebih besar dibandingkan rata-rata nasional sebesar 13,33 persen. Sementara kawasan lainnya seperti NTB maupun NTT lebih dikarenakan kondisi alamnya yang tandus.

Dengan memperhatikan masih besarnya angka ketimpangan pembangunan manusia maupun besarnya angka koefisien gini yang kian membesar, maka akan besar pula kemungkinan bonus demografi ini akan terlewat begitu saja tanpa dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, upaya mendayagunakan bonus demografi dan mengaitkannya dengan

upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, karena kedua hal tersebut sangatlah penting dan terkait erat karena SDM merupakan komponen penting baik sebagai subjek maupun objek dalam proses pembangunan.

3. BONUS DEMOGRAFI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA

Pembahasan mengenai korelasi antara penambahan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi telah menjadi sumber perdebatan panjang di kalangan para ahli dan pemikir ekonomi kependudukan. Hal ini dikarenakan adanya berbagai macam varian cara pandang dalam melihat kedua permasalahan tersebut. Cara pandang tersebut bersumber dari cara pandang terhadap fenomena ini; ada yang melihat dari jumlah (*size*) penduduk, melihat pendapatan (*income*), ketimpangan (*inequality*), maupun kondisi perekonomian nasional, hingga pada struktur penduduk (*population structure*) berikut angka natalitas, fertilitas, maupun mortalitasnya (Lee, 2003 : 170). (dalam Jati, 2013)

Menurut Blomm (2003) dalam Todaro, 2011; ada tiga pendapatan dalam melihat korelasi antara penambahan penduduk dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yakni pendapatan yang menyatakan menolak (*restrict*), mendukung (*promote*), dan netral (*independen*)

Kelompok pemikir yang pertama tergolong dalam mazab neo-Maltusian yang dipelopori oleh Garret Hardin, kelompok ini menilai bahwa keterbatasan sumberdaya alam sebagai sumber ekonomi tidak mampu lagi menampung pertumbuhan penduduk yang semakin menambah. Secara garis besar, teori pesimis yang dilandasi logika Malthusian maupun Neo-Malthusian menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan semakin menurun karena produksi sumber

ekonomi yang semakin menyusut. Ketersediaan sumber ekonomi berupa sumber daya alam yang menyusut berpengaruh pada menurunnya pendapatan penduduk secara keseluruhan. Maka dalam konteks ini, membatasi dan mengontrol pertumbuhan penduduk akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta perlu upaya untuk membatasi konsumsi ditabung dan menjadi investasi agar tetap dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan dari pemikiran dalam perspektif optimistik dikemukakan diantaranya oleh Amartya Sen yang menyatakan bahwa pembangunan manusia yang berorientasi pada pencarian laba semata tanpa memperhatikan adanya hubungan timbal balik dengan manusia dan alam justru membuat adanya bencana ekonomi manusia. Bencana tersebut dalam bentuk seperti angka ketimpangan yang semakin besar, yang ditunjukkan dengan semakin tingginya nilai koefisien gini di negara dunia ketiga, kemiskinan, dan kelaparan. Hal itulah yang kemudian memicu terjadinya pergeseran orientasi dalam pembangunan dengan mengoptimalkan potensi penduduk menjadi potensi ekonomi. Hal ini dikarenakan oleh adanya peningkatan kuantitas maupun kualitas penduduk. Peningkatan kualitas SDM inilah yang kemudian menjadi kunci dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi berbasis investasi sumber daya manusia (*human capital investment*).

Adapun pemikiran ketiga yaitu pemikiran yang independen / netral melihat bahwa antara variabel pertumbuhan penduduk dengan variabel pertumbuhan ekonomi pada dasarnya tidak berkorelasi dan berjalan secara independen tanpa ada ikatan. Terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi apakah naik atau turun sebenarnya bukan hanya tergantung pada tingkat konsumsi penduduk sebagai konsumen maupun

produksi tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi dilihat sebagai adanya spesialisasi antara faktor produksi antar penduduk yang kemudian terjadi tukar-menukar barang jasa sesuai dengan nilai ekonomisnya. Sementara, pertumbuhan penduduk dipandang sebagai proses yang alami seiring dengan meningkatnya pendapatan, dinamika perekonomian yang semakin kompetitif, maupun kebutuhan sandang, papan, dan pangan yang kian meningkat dan beragam.

Untuk kasus Indonesia, potensi manfaat ekonomi dari bonus demografi yang ditandai besarnya jumlah penduduk usia produktif dan rendahnya angka ketergantungan penduduk terancam menjadi sia-sia. Jika penduduk usia produktif lebih banyak menganggur dan tidak mempunyai penghasilan, akan menjadi beban dan ancaman bagi perekonomian nasional. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan, jumlah pengangguran terbuka nasional tahun 2011 mencapai 6,56 persen (7,7 juta jiwa) penduduk. Penganggura terbuka usia muda (15-24 tahun) mencapai 5,3 juta jiwa, 20 persen (1,06 juta jiwa) diantaranya adalah lulusan perguruan tinggi. Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyatakan bahwa pekerja usia muda Indonesia 4,6 kali lebih sulit mendapatkan kerja dibandingkan pekerja dewasa. Hal ini dikarenakan penduduk usia muda masih memiliki pendidikan yang relative lebih rendah dengan jumlah yang jauh lebih besar. Angka ini jauh lebih tinggi dari rata-rata dunia, pekerja usia muda 2,8 kali lebih sulit

mendapat kerja. ILO juga mencatat bahwa pengangguran terbuka berumur 15-29 tahun di Indonesia 19,9 persen, merupakan angka tertinggi di antara negara-negara di Asia Pasifik. Meskipun angka ini lebih rendah dari negara-negara di Eropa yang sedang dilanda krisis keuangan.

PENUTUP

Dari pembahasan di atas beberapa catatan dan rekomendasi yang dikemukakan dalam kajian ini adalah:

1. Bonus Demografi tidak serta merta datang dengan sendirinya, tetapi untuk menjadikannya sebagai potensi ekonomi nasional, perlu dipersiapkan dan selanjutnya dimanfaatkan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2. Ada syarat yang harus dipenuhi agar Bonus Demografi dapat dimanfaatkan dengan baik dengan mempersiapkannya sejak tahap perencanaan sampai dengan implementasinya di tingkat lapangan. Persiapan ini antara lain melalui :
 - a) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 - b) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan;
 - c) Pengendalian Jumlah Penduduk;
 - d) Kebijakan Ekonomi yang mendukung fleksibilitas tenaga kerja dan pasar kerja, keterbukaan perdagangan dan peningkatan akses tabungan dan investasi nasional.
3. Besarnya anggaran bidang Pendidikan yang mencapai 20% dari nilai APBN, harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kualitas SDM, utamanya SDM yang akan masuk dalam bursa kerja dengan memperbanyak cakupan pendidikan kejuruan dan ketrampilan serta melalui Balai-balai Latihan Kerja.
4. Dalam Bidang Keluarga Berencana, upaya penurunan tingkat kelahiran tidak boleh terlalu rendah sehingga akan mengurangi jumlah penduduk di masa depan, utamanya penduduk usia kerja/produktif.
5. Harus mulai dipikirkan permasalahan-permasalahan yang timbul pasca berakhirnya masa Bonus Demografi, dimana jumlah lansia akan meningkat.
6. Diperlukan kebijakan revitalisasi pendidikan dunia kerja, guna memenuhi tantangan ketenagakerjaan dalam menghadapi keterbukaan pasar kerja ASEAN 2015, dimana tenaga kerja asal Negara ASEAN dari luar bebas bekerja di Indonesia.
7. Untuk memanfaatkan bonus demografi, dipandang perlu kebijakan guna mendorong munculnya wirausaha muda, dan memberdayakannya untuk mendukung pembangunan nasional.
8. Bonus Demografi tanpa diikuti pendidikan yang merata dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai akan menjadikan ancaman bagi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan nasional harus cekatan dalam menempatkan penduduk Indonesia dewasa yang melimpah sebagai kekuatan yang potensial dengan menempatkan program pendidikan nasional sebagai pilar utama pembanguanan nasional.
9. Pendidikan jangan dijadikan komoditas barang eksklusif agar seluruh elemen masyarakat bisa menikmatinya. Dengan demikian terciptalah generasi emas yang siap menghadapi tantangan pada era Bonus Demografi pada tahun 2020-2030

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, Toeti Prahastika. 2012. "Memaknai Bonus Demografi", Media Indonesia, 20 Juli, 2012
- Adioetomo, Sri Moertiningsih. 2005. Bonus Demografi : Hubungan antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi. Jakarta : BKKBN
- Alisjahbana, Armida. 2013. —Perkembangan Ekonomi Terkini dan Prospek Ekonomi Tahun 2013 . <http://bappenas.go.id/get-file->

- server/node/12568/, tanggal akses 7 Oktober 2014.
- Badan Pusat Statistik. 2014. —Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____ ; SAKERNAS, berbagai tahun.
- Jati, Wasisto Raharjo, 2013; Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang Atau Jendela Bencana Di Indonesia ?
- Lee, Ronald. 2003. The Demographic Transition: Three Centuries of Fundamental Change, Journal of Economic Perspectives 17(4): 167-190.
- Sanisah, Siti, 2010; Pendidikan Tinggi dan Pengangguran Terbuka: Suatu Dilema; Lentera Pendidikan, Vol: 13, No 2, Desember 2010, hal 147-159
- Srihadi, Endang. 2012. Bonus Demografi : Jendela Kesempatan atau Jendela Bencana? Update Indonesia 7(1): 2-8.
- Todaro, Michel, 2011, “Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga” edisi Terjemahan, Erlangga.
- Tukiran dkk. 2007. “Sumber Daya Manusia Tantangan Masa Depan”. Pustaka pelajar : Yogyakarta. <http://bisnis.vivanews.com> diakses 6 September 2014 <http://kompas.com> diakses 2 Oktober 2014